



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi kasus pada 10 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi)**

SKRIPSI

Oleh:

**Dwi Bagus Mei Alfianto
NIM. 130810101209**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi kasus pada 10 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Dwi Bagus Mei Alfianto
130810101209

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ngatinah S.pd dan Ayahanda Mat Hasan tercinta yang senantiasa tulus memberikan doa, semangat dan nasehat dalam setiap perjalanan demi kesuksesan ananda;
2. Kakakku May Akhadiyah yang telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada ananda untuk terus semangat, memberikan motivasi dalam meraih kesuksesan;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tidak ternilai dengan segala kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi”
(Robert K. Cooper)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Kebahagiaan adalah kesetiaan, setia atas indahnya merasa cukup, setia atas indahnya berbagi, setia atas indahnya ketulusan berbuat baik ”

(Tere Liye)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Bagus Mei Alfianto

NIM : 130810101209

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2017
Yang menyatakan,

Dwi Bagus Mei Alfianto
NIM 130810101209

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi kasus pada 10 Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi)**

Oleh
Dwi Bagus Mei Alfianto
NIM 130810101209

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Nanik Istiyani, M.Si
Dosen Pembimbing II : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E.,M.Si

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di
Provinsi Jawa Timur
Nama Mahasiswa : Dwi Bagus Mei Alfianto
NIM : 130810101209
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 24 Oktober 2017

Pembimbing I

Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 196106122 198702 2 00 2

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si
NIP. 197002061994031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, S.E., M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Bagus Mei Alfianto

NIM : 130810101209

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

17 November 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si (.....)
(196004121987021001)
2. Sekretaris : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes (.....)
(19581206 1986031003)
3. Anggota : Fivien Muslihatinningsih, S.E.,M.Si (.....)
(198301162008122001)

Mengetahui/Menyetujui,

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Foto 4 X 6
warna

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak. CA

NIP. 19710727 199512 1 001

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Dwi Bagus Mei Alfianto

*Program Studi Ekonomi Pembangunan , Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah agar masalah tingkat kemiskinan dapat teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lamongan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan alat analisis data panel jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat kemiskinan.

Factors that Affect the Level of Poverty in East Java Province

Dwi Bagus Mei Alfianto

Economic Development Study Program, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

Development must be done in an integrated and continuous, one of them with direct development on areas that have a low level of well-being so that the problem of poverty level can be resolved. This research aims to know the magnitude of the influence of population, human development index (HDI) and gross Regional domestic product (GDP) against the level of poverty in East Java province. This study uses secondary data in the form of poverty levels, population, human development index (HDI) and gross Regional domestic product (GDP) in 10 regencies in East Java province which includes the Districts of Sampang, Bangkalan Regency Regency Probolinggo Regency, Sumenep, Pamekasan Regency of Tuban, Bojonegoro, district of Pacitan Regency, the districts of Wonogiri and Lamongan which has the highest rate of poverty in East Java province year 2010-2015. With the analysis tools used is regression of the data panel. The results of this research show that the panel data analysis tools with the population and human development index (HDI) has a negative influence and significantly to the level of poverty in East Java province year 2010 – 2015, while Domestic Products (GDP) gross regional influence positively and significantly to the level of poverty in East Java province year 2010 – 2015.

Keywords: *human development index (HDI), population, gross Regional domestic product (GDP), and the level of poverty.*

RINGKASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; Dwi Bagus Mei Alfianto; 130810101209; 2017; 88 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penganggulan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2006:20). Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan bahkan menjadi perhatian isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals, MDGs*). MDGs menetapkan sebagai sasaran utamanya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim (*exteme poverty*) dan kelaparan pada tahun 2015. Negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dihadapkan pada masalah kemiskinan. Menurut para ahli ekonomi kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder.

Pembangunan di Indonesia masih tidak merata antara provinsi satu dengan provinsi lainnya, di luar Pulau Jawa hanya sebagian wilayah yang menikmati pembangunan tersebut, bahkan di wilayah terpencil masih ada yang belum tersentuh oleh pembangunan dari pemerintah. Selama ini pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun ternyata muncul masalah kemiskinan yang

tinggi terjadi di Pulau Jawa. Hal ini mengingat Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding pulau lain di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di pulau Jawa berbeda di setiap provinsinya. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur, perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2010-2015, secara jumlah dan persentase mengalami penurunan, yang diakibatkan tidak meratanya pembangunan di setiap daerah. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur, sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah-daerah tertentu. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan. Terdapat 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan, terutama di 10 kabupaten Provinsi Jawa Timur yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, sedangkan data yang digunakan adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan alat analisis data panel jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk dari jaman kegelapan menuju kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, kritik, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ibu juga tidak lupa dalam mengajarkan arti penting dari kesabaran, keikhlasan dan bagaimana cara menghargai orang lain;
2. Bapak Dr.Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing, memberikan saran, kritik dan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin. M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

7. Ibunda Ngatinah S.pd dan Ayahanda Mat Hasan, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, kerja keras dan kasih sayang yang tak ternilai harganya yang telah diberikan. Segala bentuk pengorbanan telah dilakukan demi ananda. Terima kasih telah mendampingi ananda dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga ananda mampu menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan;
8. Kakakku May Akhadiyah, terima kasih atas segala kasih sayang yang dijadikan penulis sebagai semangat untuk terus maju;
9. Terimakasih Anne Chintya Manopo yang telah menemani dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku Ipow, Adel, Dini, Fitri, Putri, Eka, Dardak, Dika, Agam, Wildan, Cahyo, Angga Tom dan Rhokim terima kasih atas semua kenangan, canda tawa, dan keluh kesah. Semoga kita tetap dapat menjalin tali silaturahmi dan meraih kesuksesan di masa depan;
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 2013 khususnya Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia 2013;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa didunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, dan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 24 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kemiskinan	10
2.1.2 Konsep kemiskinan.....	11
2.1.3 Jenis-jenis kemiskinan	13
2.1.4 Penyebab kemiskinan	14
2.1.5 Indikator kemiskinan	14

2.1.6 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ...	16
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	31
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3.1.2 Jenis dan Sumber data.....	32
3.1.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metode Analisis Data.....	33
3.2.1 Metode <i>Pooled Least Square</i> (PLS)	35
3.2.2 Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	35
3.2.3 Metode <i>Random Effect Model</i> (REM)	35
3.3 Pemilihan Model <i>Panel Data</i>	36
3.3.1 Uji Chow	36
3.3.2 Uji Hausmann	36
3.3.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	37
3.4 Uji Kesesuaian (<i>Test of Goodness of Fit</i>).....	37
3.4.1 Uji F Simultan.....	37
3.4.2 Uji t Parsial	39
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	40
3.5 Uji Kesesuaian (<i>Test of Goodness of Fit</i>).....	40
3.5.1 Uji Normalitas.....	40
3.5.2 Uji Multikolinearitas.....	41
3.5.3 Uji Heterokedastisitas	42
3.5.4 Uji Autokorelasi.....	43
3.6 Definisi Variabel Operasional.....	43
BAB 4. PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum	45
4.1.1 Keadaan Geografis 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	45

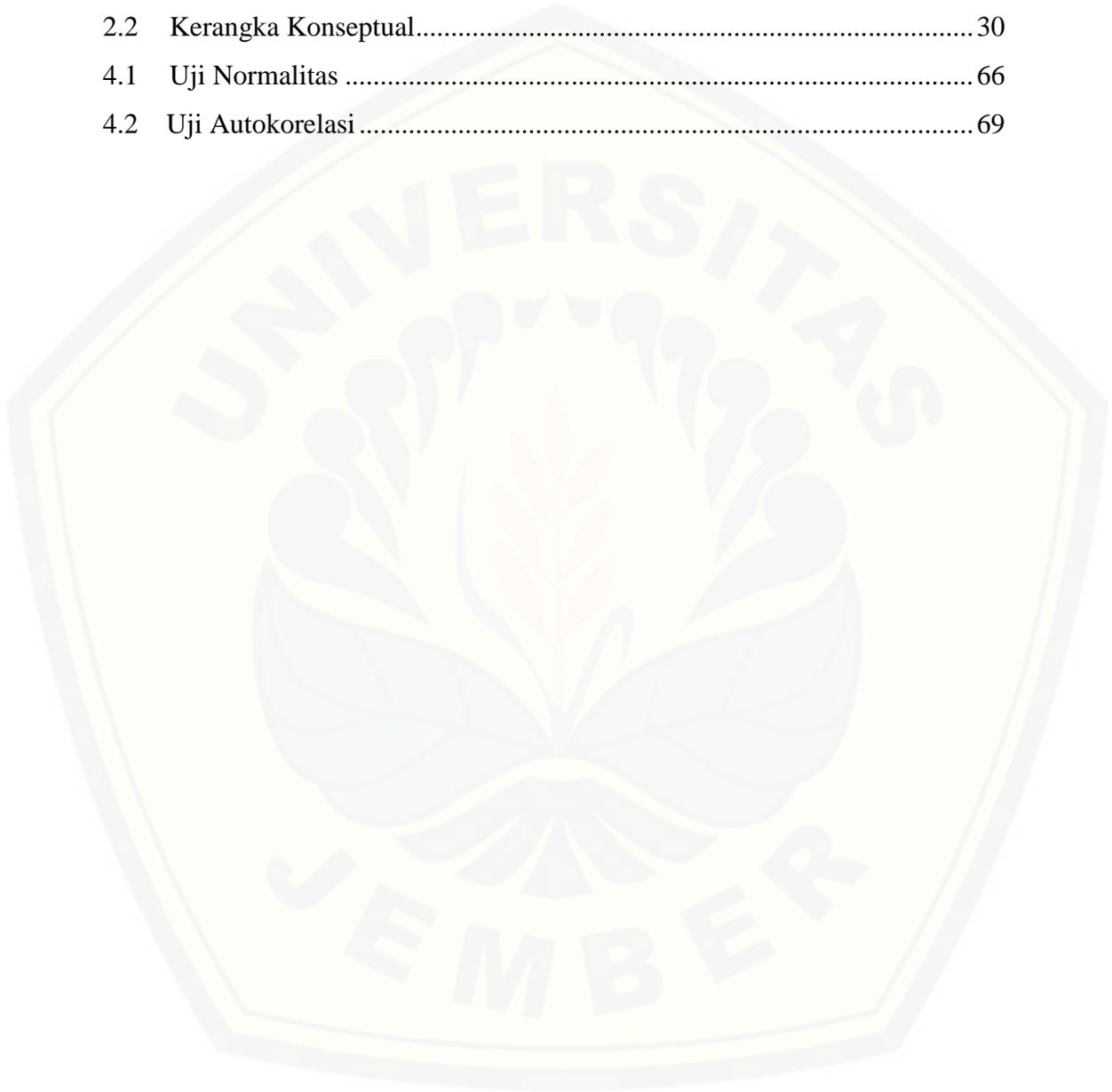
4.1.2	Gambaran Tingkat Kemiskinan pada 10 Kabupaten	49
4.1.3	Gambaran Jumlah Penduduk pada 10 Kabupaten	52
4.1.4	Gambaran IPM pada 10 Kabupaten.....	54
4.1.5	Gambaran PDRB pada 10 Kabupaten	56
4.2	Analisis Data.....	58
4.2.1	Analisis Deskriptif	58
4.2.2	Analisa Hasil Estimasi dengan <i>Panel Data</i>	59
4.2.3	Model Terbaik <i>Panel Data</i> : <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	61
4.2.4	Uji Kesesuaian (<i>Test of Goodness of Fit</i>)	63
4.2.5	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3	Pembahasan	69
4.3.1	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	69
4.3.2	Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	71
4.3.3	Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	72
BAB 5	PENUTUP.....	75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2015	2
1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015	5
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
3.5 Kriteria Pengujian Durbin-Watson	43
4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi Tahun 2010 – 2015 (persen)	53
4.2 Jumlah Penduduk pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi Tahun 2010 – 2015	53
4.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (Persen) pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi Tahun 2010 – 2015.....	54
4.4 Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2010, pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	57
4.5 Statistik Deskriptif Masing-masing Variabel.....	58
4.6 Perbandingan Estimasi <i>Panel Data</i> Model PLS, FEM dan REM	59
4.7 Uji Chow.....	60
4.8 Uji Hausmann	61
4.9 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	62
4.10 Uji t-statistik	65
4.11 Uji Multikolinearitas.....	67
4.12 Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser	68
4.13 Indeks Gini 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (persen).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>The Vicious Circle of Poverty</i>)	11
2.2 Kerangka Konseptual.....	30
4.1 Uji Normalitas	66
4.2 Uji Autokorelasi.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A Data Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM dan PDRB pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2015	81
B Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Kemiskinan, JP, IPM, dan PDRB.....	85
C Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Pooled Least Square (PLS)</i>	86
D Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Fixed Effect Model (FEM)</i>	87
E Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Random Efect Model (REM)</i>	88
F Uji Chow.....	90
G Uji Hausman	91
H Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser	92
I Uji Multikolinearitas.....	93
J Uji Normalitas	94

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, serta kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999:11).

Indonesia sebagai negara berkembang melaksanakan pembangunan secara seimbang yaitu pembangunan manusia seutuhnya, lahir maupun batin secara seimbang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Irawan dan Suparmoko, 1982:20). Pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2006:20). Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Simatupang dan Saktyanu (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan strategi atau instrumen pembangunan agar masalah kemiskinan dapat teratasi.

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak kunjung usai, karena masalah kemiskinan bersifat kompleks dan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. Kemiskinan bahkan menjadi perhatian isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*). MDGs menetapkan sebagai sasaran utamanya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim (*exteme poverty*) dan kelaparan pada tahun 2015. Negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dihadapkan pada masalah kemiskinan. Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal sederhana, karena kemiskinan bersifat kompleks.

Kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi karena mayoritas penduduknya di sektor pertanian dan banyak dalam kategori penduduk miskin. Menurut para ahli ekonomi kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk 2008).

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah agar masalah kemiskinan dapat dikurangi. Kebijakan dan program dari pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum menampakkan hasil yang optimal, karena masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena program kebijakan lebih berorientasi ke sektoral.

Pembangunan di Indonesia masih tidak merata antara provinsi satu dengan provinsi lainnya, di luar Pulau Jawa hanya sebagian wilayah yang menikmati pembangunan tersebut, bahkan di wilayah terpencil masih ada yang belum tersentuh oleh pembangunan dari pemerintah. Selama ini pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun ternyata muncul masalah kemiskinan yang tinggi terjadi di Pulau Jawa. Hal ini mengingat Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding pulau lain di Indonesia. Tingkat kemiskinan di pulau Jawa berbeda di setiap provinsinya. Berikut Tabel 1.1 yang menunjukkan data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2015.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013- 2015

Provinsi	2013		2014		2015	
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
DKI Jakarta	375.7	3.72	412.79	4.09	368.67	3.61
Jawa Barat	4382.65	9.61	4238.96	9.18	4485.65	9.57
Jawa Tengah	4704.9	14.44	4561.82	13.58	4505.78	13.32
DI Yogyakarta	535.15	15.03	532.59	14.55	485.56	13.16
Jawa Timur	4865.82	12.73	4748.42	12.28	4775.97	12.28
Banten	682.71	5.89	649.19	5.51	690.67	5.75

Sumber : BPS, 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mempunyai angka kemiskinan tertinggi dibanding Provinsi lainnya. Meskipun perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2013-2015, secara jumlah dan persentase mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 4865,82 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,73 persen. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin 4748,42 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 12,28 persen. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 4775,97 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin 12,28 persen. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional, namun hal itu tidak

menghindarkan Provinsi Jawa Timur dari masalah kemiskinan yang tinggi. Meskipun dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, namun masih terjadi tingkat kemiskinan yang tidak merata yang diakibatkan tidak meratanya pembangunan di setiap daerah.

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur, sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah-daerah tertentu. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Berikut ini Tabel 1.2 yang menunjukkan data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2013-2015. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 240,4 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 25,69%.

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013- 2015.

Kabupaten/kota	2013		2014		2015	
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
Kab. Pacitan	91,7	16,73	88,9	16,18	92,1	16,68
Kab. Ponorogo	103,0	11,92	99,9	11,53	103,2	11,91
Kab. Trenggalek	92,8	13,56	90,0	13,10	92,2	13,39
Kab. Tulungagung	91,7	9,07	89,0	8,75	87,4	8,57
Kab. Blitar	120,3	10,57	116,7	10,22	114,1	9,97
Kab. Kediri	202,7	13,23	196,8	12,77	199,4	12,91
Kab. Malang	288,6	11,48	280,3	11,07	292,9	11,53
Kab. Lumajang	124,4	12,14	120,7	11,75	118,5	11,52
Kab. Jember	278,5	11,68	270,4	11,28	269,5	11,22
Kab. Banyuwangi	152,2	9,61	147,7	9,29	146,0	9,17
Kab. Bondowoso	115,3	15,29	111,9	14,76	113,7	14,96
Kab. Situbondo	90,3	13,65	87,7	13,15	91,2	13,63
Kab. Probolinggo	238,7	21,21	231,9	20,44	237,0	20,82
Kab. Pasuruan	175,7	11,26	170,7	10,86	169,2	10,72
Kab. Sidoarjo	138,2	6,72	133,8	6,40	136,1	6,44
Kab. Mojokerto	116,6	10,99	113,3	10,56	113,9	10,57
Kab. Jombang	137,5	11,17	133,5	10,80	133,8	10,79
Kab. Nganjuk	140,8	13,60	136,5	13,14	132,0	12,69
Kab. Madiun	83,7	12,45	81,2	12,04	84,7	12,54
Kab. Magetan	76,3	12,19	74,0	11,80	71,2	11,35
Kab. Ngawi	127,5	15,45	123,2	14,88	129,3	15,61
Kab. Bojonegoro	196,8	16,02	190,9	15,48	194,0	15,71
Kab. Tuban	196,9	17,23	191,1	16,64	196,6	17,08
Kab. Lamongan	192,0	16,18	186,1	15,68	182,6	15,38
Kab. Gresik	171,6	13,94	166,9	13,41	170,8	13,63
Kab. Bangkalan	218,3	23,23	212,2	22,38	216,2	22,57
Kab. Sampang	248,2	27,08	239,6	25,80	240,4	25,69
Kab. Pamekasan	153,7	18,53	148,8	17,74	146,9	17,41
Kab. Sumenep	225,5	21,22	218,9	20,49	216,8	20,20
Kota Kediri	22,8	8,23	22,1	7,95	23,8	8,51
Kota Blitar	10,1	7,42	9,8	7,15	10,0	7,29
Kota Malang	41,0	4,87	40,6	4,80	39,1	4,6
Kota Probolinggo	19,2	8,55	19,0	8,37	18,7	8,17
Kota Pasuruan	14,6	7,60	14,2	7,34	14,5	7,47
Kota Mojokerto	8,3	6,65	8,0	6,42	7,7	6,16
Kota Madiun	8,7	5,02	8,5	4,86	8,6	4,89
Kota Surabaya	169,4	6,00	164,4	5,79	165,7	5,82
Kota Batu	9,4	4,77	9,1	4,59	9,4	4,71
Jawa Timur	4893,0	12,73	4748,4	12,28	4789,1	12,34

Sumber : BPS Jawa Timur

Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi umumnya berada di Pulau Madura, yang terbukti masih tinggi jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, hal ini menunjukkan masih tidak meratanya pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 tingkat kemiskinan yang paling tinggi sebesar 25,69 persen di kabupaten Sampang. Sedangkan tingkat kemiskinan yang paling rendah untuk wilayah kabupaten terletak di kabupaten Tulungagung sebesar 8,57 persen dan untuk wilayah kota terletak di kota Malang sebesar 4,60 persen.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Dari perkembangan tingkat kemiskinan pada kabupaten tersebut menunjukkan hal yang positif, yaitu dari tahun ke tahun mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang berarti tingkat kemiskinannya semakin menurun. Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah. Adanya otonomi daerah harusnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut, namun hal ini belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan berbagai program kebijakan untuk menekan tingkat kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan pemerintah yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin. Meski sudah dilakukan usaha demikian, namun masih ada kemiskinan yang cukup tinggi terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga mampu mengurangi masalah kemiskinan. Namun masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi mikro saja, tapi juga harus dilihat dari segi makro untuk menekan kemiskinan, mulai dari pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk di Jawa Timur yang tinggi dan terus bertambah, membuat laju pertumbuhan penduduk meningkat. Teori Malthus dalam Skuosen

(2009:85), pada intinya menyatakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi manusia yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena banyaknya kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar yang harus di waspadai, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Daerah atau wilayah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh IPM yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia menjadi variabel yang sangat penting bagi suatu negara atau daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. Lanjouw dkk (dalam Mulyaningsih, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia berhubungan dengan tingkat produktivitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktivitas masyarakat akan meningkat, serta akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Faktor IPM bukan salah satu faktor yang menjadi acuan atau latar belakang dalam penelitian ini, faktor PDRB juga akan dilihat karena untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB juga indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Selain itu PDRB juga merupakan ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (*production*

possibilities) suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, karena ada pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini mengenai tingkat kemiskinan pada 10 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Sehingga penulis mengambil judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan, terutama di 10 kabupaten Provinsi Jawa Timur yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan multidimensional bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memahami masalah Tingkat Kemiskinan, khususnya yang terjadi pada 10 kabupaten Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi aspirasi pemikiran terhadap pengambil keputusan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Kemiskinan menurut BPS (2016) diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

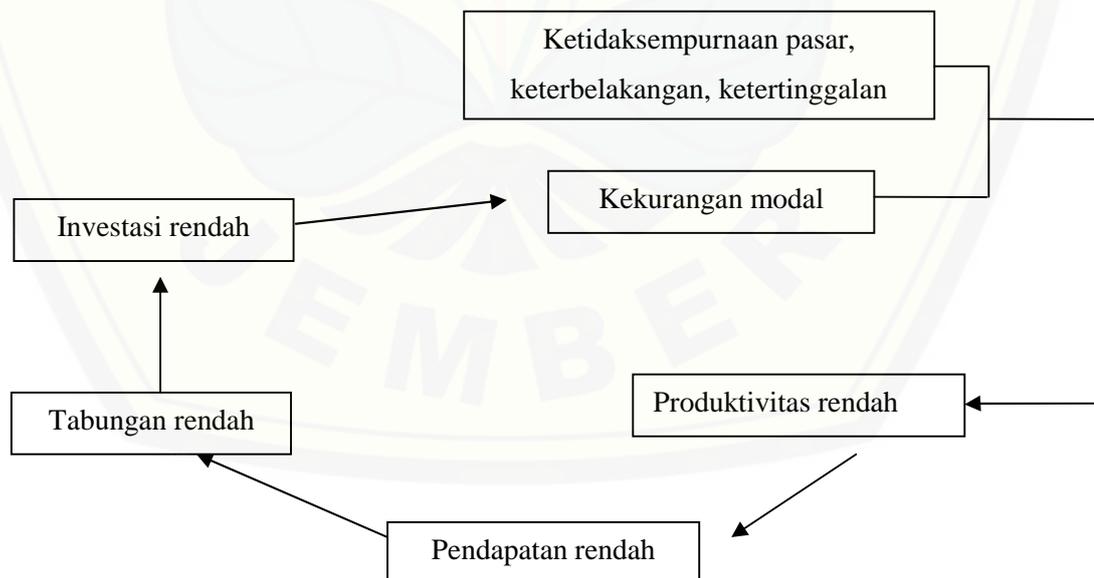
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki ata perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Menurut Arsyad (1999:115) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya dari aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi

sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Dimensi ini saling berkaitan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

2.1.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan Ragnar Nurkse atau dikenal sebagai teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) adalah suatu lingkaran yang merupakan rangkaian yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan suatu keadaan dimana negara akan tetap mengalami kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang lebih baik kedepannya (Nurdiansyah, 2016).



Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*) (Sumber : Kuncoro, 2000 : 107).

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima dan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran kemiskinan ini. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000:107) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Robert Chambers (1987) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* dan inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Hal ini dinilai sesuai kenyataan dan secara konseptual jelas. Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu : kemiskinan itu sendiri (*poverty*), kelemahan fisik (*physical weakness*), keterasingan atau kadar isolasi (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kelima unsur ini saling berkaitan antara satu dengan lain, sehingga perangkap kemiskinan ini benar-benar terjadi, yang bisa menjerat keluarga miskin.

Kerentanan dan ketidakberdayaan menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menghadapi keadaan darurat, seperti bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin. Kerentanan ini dapat menimbulkan *poverty rockets* atau penggerak kemiskinan yang dapat menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya. Dari sisi ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya yang terjadi di pedesaan, adanya oknum yang memanfaatkan bantuan bagi orang miskin, namun bantuan itu dimanfaatkan sendiri oleh oknum tersebut yang memiliki kekuasaan. Hal inilah yang menjadi ketidakberdayaan keluarga miskin, yang seharusnya menerima, namun diterima oleh kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak menerima.

Teori kemiskinan menurut Anne Booth dalam Rupelu (2005), mengungkapkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya

kemiskinan. Faktor tersebut adalah faktor ekonomi yang terdiri atas kurang modal dan rendahnya teknologi. Kedua adalah faktor sosial budaya yang terdiri atas rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya kerja dan adanya budaya miskin. Faktor ketiga adalah geografi dan lingkungan yang terdiri atas keterisolasian wilayah, banyak penyakit dan kurang suburnya lahan. Faktor keempat adalah personal dan fisik yang terdiri atas umur, jenis kelamin dan tingkat kesehatan. Faktor kelima adalah keterbatasan mengakses beberapa hal seperti produk pasar, fasilitas publik, dan fasilitas kredit. Jadi kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi saja, namun banyak faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan tersebut.

2.1.3 Jenis-jenis Kemiskinan

Beberapa jenis-jenis kemiskinan menurut Mardimin (1996:24), sebagai berikut :

1. kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila tidak memiliki kemampuan dalam memnuhi kebutuhan untuk melakukan aktivitas dengan efisien dan optimal;
2. kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin relatif apabila kemampuannya lebih rendah daripada kemampuan orang lain jika dibandingkan dalam satu daerah;
3. kemiskinan struktural. Seseorang dikatakn miskin struktural apabila dari struktur asalnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta tidak dapat mendukung bagi golongan yang rendah;
4. kemiskinan situasional atau kemiskinan natural. Kemiskinan ini terjadi di daerah-daerah yang memang keadaannya miskin dan tidak mendukung dalam pemenuhan kebutuhannya;
5. kemiskinan kultural. Kemiskinan ini merupakan budaya dari masyarakatnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan telah menjadi kebiasaan.

2.1.4 Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan yang tidak merata.

Penyebab kemiskinan menurut Sharp, et.al dalam Kuncoro (2000:107) sebagai berikut :

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara dari teori lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*).

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan mengacu pada garis kemiskinan, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2003). Di Indonesia sendiri telah ditetapkan ukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), yaitu dihitung

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari, hasil itu ditetapkan dari penghitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

Menurut Sajogyo dalam Arsyad (1999:240), ada tiga golongan orang miskin berdasarkan konsumsi beras per kapita pertahun:

1. Nyaris miskin, perkotaan sebesar 720 kg/kapita/tahun dan pedesaan 480 kg/kapita/tahun;
2. miskin, perkotaan sebesar 360 kg/kapita/tahun dan pedesaan 320 kg/kapita/tahun;
3. sangat miskin, perkotaan 360 kg/kapita/tahun dan pedesaan 240 kg/kapita/tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan per kapita. Penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari masuk dalam kategori keluarga miskin. Kondisi kemiskinan di setiap kelompok masyarakat berbeda, sehingga perlu adanya pengelompokan tingkat kemiskinan untuk memudahkan menganalisis. Tingkatan kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Syahyuti, 2006:95), yaitu :

1. kelompok yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan, dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial untuk menunjang kehidupannya;
2. kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun masih memiliki untuk mengakses pelayanan sosial dasar;

3. kelompok rentan (*vulnerable group*), merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik dan terhitung layak, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

2.1.5 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

A. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan

Menurut BPS Jawa Timur (2016) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Maier dalam Kuncoro (1999:110), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan. Pertama, adalah pandangan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan penghambatan pembangunan ekonomi yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Kedua adalah pandangan yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat mendorong pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial.

Menurut Mulyadi dalam Ellah (2016), Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan migrasi keluar. Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di negara-negara sedang berkembang. Sehingga masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya.

Pada tahun 1798 Reverend Thomas Malthus mengemukakan teori mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya berjudul *Essay on the Principle of Population* menjelaskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing returns*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun (Arsyad, 1999:270). Menurut Malthus dan Neo-Malthusian, negara-negara miskin tidak akan pernah mampu meningkatkan tingkat pendapatan per kapitanya di atas tingkat pendapatan per kapita subsisten kecuali mereka melakukan usaha yang bersifat preventif (pengendalian kelahiran) terhadap pertumbuhan penduduk. Jika tidak usaha pengendalian secara “preventif”, maka pengendalian “positif” (kelaparan, penyakit, perang) terhadap pertumbuhan penduduk mau tidak mau akan merupakan kekuatan pengendalian.

Thomas Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten. Oleh karena itu Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau “kemiskinan absolut” adalah menganjurkan masyarakat untuk menahan hawa nafsu (*moral restraint*) dan membatasi jumlah keturunannya (Arsyad, 1999:271).

Beban tanggungan keluarga akibat dari jumlah anak yang banyak menimbulkan masalah pada penyediaan bahan pangan, perumahan, peralatan modal, pendidikan dan kesehatan. Akibatnya akan menyebabkan pendapatan perkapita yang rendah sehingga standar hidup juga rendah. Keterkaitan jumlah penduduk dengan kemiskinan, dimana jumlah penduduk meningkat akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, seperti dengan melakukan program Keluarga Berencana (KB).

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

Indeks pembangunan manusia merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, yang memiliki peran sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari masalah kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan.

Todaro (2006:287) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan manusia sebagai kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*), hidup sehat (*healthy life*), dengan indikator angka harapan hidup dan untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Sehingga ketiga dimensi tersebut sangat penting dalam pembangunan manusia, dan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya :

1. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
3. Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Saputra (2011), Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya juga meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

C. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi meningkat. Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, dan teori pertumbuhan Kuznet.

1. Teori Pertumbuhan ekonomi Klasik

Dalam teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan Jhon Stuart Mill menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan kemajuan teknologi.

Menurut Adam Smith (1776) bahwa masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasakan terbaik untuk dilakukan. Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal, dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan

dilakukannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan mendorong bertambahnya jumlah penduduk.

Adam Smith mengemukakan terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999:54-55).

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah)

Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara, yang dimaksud adalah jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*, yaitu jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3. Stok barang modal

Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan *output*. Peranannya sangat sentral dalam proses penambahan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumberdaya alam).

b. Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (Arsyad 1999:57).

Menurut David Ricardo dalam Arsyad (1999:58) menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah sehingga menjadi faktor yang membatasi dalam proses pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat, dan menyebutkan beberapa ciri perekonomian sebagai berikut :

1. Jumlah tanah terbatas
2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah atau *natural wage*)
3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik investor melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
5. Sektor pertanian dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marjinal (*marginal product*). Selama tenaga kerja yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka jumlah tenaga kerja akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marjinal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah. Proses tersebut akan berhenti apabila tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah

tingkat upah alamiah, maka jumlah tenaga kerja menurun dan tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada saatnya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

2. Teori Pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.w. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini melihat banyak mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga tidak banyak diperlukan campur tangan dari tangan pemerintah dalam mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari akumulasi modal, bertambahnya tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi dapat meningkatkan skill, sehingga produktivitas capital meningkat. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasar analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapaitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999:62).

3. Pertumbuhan Ekonomi Simon Kuznet

Menurut Todaro (2006:240) Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung menurun, namun pada tahap selanjutnya mengalami kenaikan, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Kuznet menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang, dimana pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan

teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Tiga komponen dari definisi sangat penting ini artinya :

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup.
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus dilakukan.

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Terdapat pendapat bahwa pertumbuhan yang cepat akan berakibat buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Menurut Sukirno (2004), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau bahkan lebih kecil. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus mengetahui sejauh mana distribusi pendapatan menyebar ke lapisan masyarakat. Karena apabila pertumbuhan ekonomi baik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, dan menyebar secara merata ke lapisan masyarakat, sehingga dari peningkatan pendapatan yang terjadi masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik.

Guna mengetahui laju pertumbuhan ekonomi atas harga konstan yang terjadi tiap satu waktu tertentu (satu tahun), maka dapat dihitung dengan rumus :

$$Y_{it} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Y_{it} = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i tahun
 $PDRB_t$ = PDRB atas harga konstan kabupaten/kota i pada tahun t
 $PDRB_{t-1}$ = PDRB atas harga konstan kabupaten/kota i pada tahun t – 1

Menurut Todaro (2006:220) konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat dan terganggu. Sedangkan menurut Tambunan (2003) permasalahan ekonomi tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengacu pada teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2011) yang berjudul “Analisis pengaruh Jumlah penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kabupaten/kota Jawa Tengah”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian oleh Rusdarti dan Sebayang (2013) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Penelitian oleh Cholili (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia). Teori kemiskinan, pertumbuhan PDRB dan IPM dengan model Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian oleh Yanthi dan Marheni (2015) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Analisis data menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan tingkat upah berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pendidikan dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin dan pengangguran berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

Nurdiansyah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Karisidenan Besuki dan Lumajang”. Metode ini menggunakan metode penelitian explanatory. Variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, sementara variabel upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dan variabel pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Karisidenan Besuki dan Lumajang.

Penelitian oleh Mahsunah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”. Metode ini menggunakan analisis berganda, dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Koefisien regresi jumlah penduduk diperoleh hasil negatif sebesar -0.571860, pada variabel pendidikan sebesar -0.554732, sehingga variabel tersebut tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian oleh Salam (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran Terhadap Angka Kemiskinan di Madura”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model panel data yang diturunkan dari teori Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan variabel APBD (prob 0,0331), PDRB (prob 0,0680), dan variabel angka pengangguran (prob 0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat R^2 sebesar 0,752186 atau 75,21 persen.

Untuk mempermudah mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Saputra, 2011. Jurnal. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.	Analisis pengaruh Jumlah penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kabupaten/kota Jawa Tengah.	Variabel : Jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran. Alat analisis: analisis regresi linier berganda (<i>Ordinary Least Squares Regression Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2	Rusdarti dan Sebayang, 2013. Jurnal <i>Economia</i> , Volume 9, Nomor 1, April 2013.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel : Tingkat pengangguran, PDRB dan pengeluaran publik. Alat analisis : Analisis data menggunakan teknik <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB, pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan
3	Cholili, 2014. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia).	Variabel : Pengangguran, PDRB, dan IPM Alat analisis: <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan

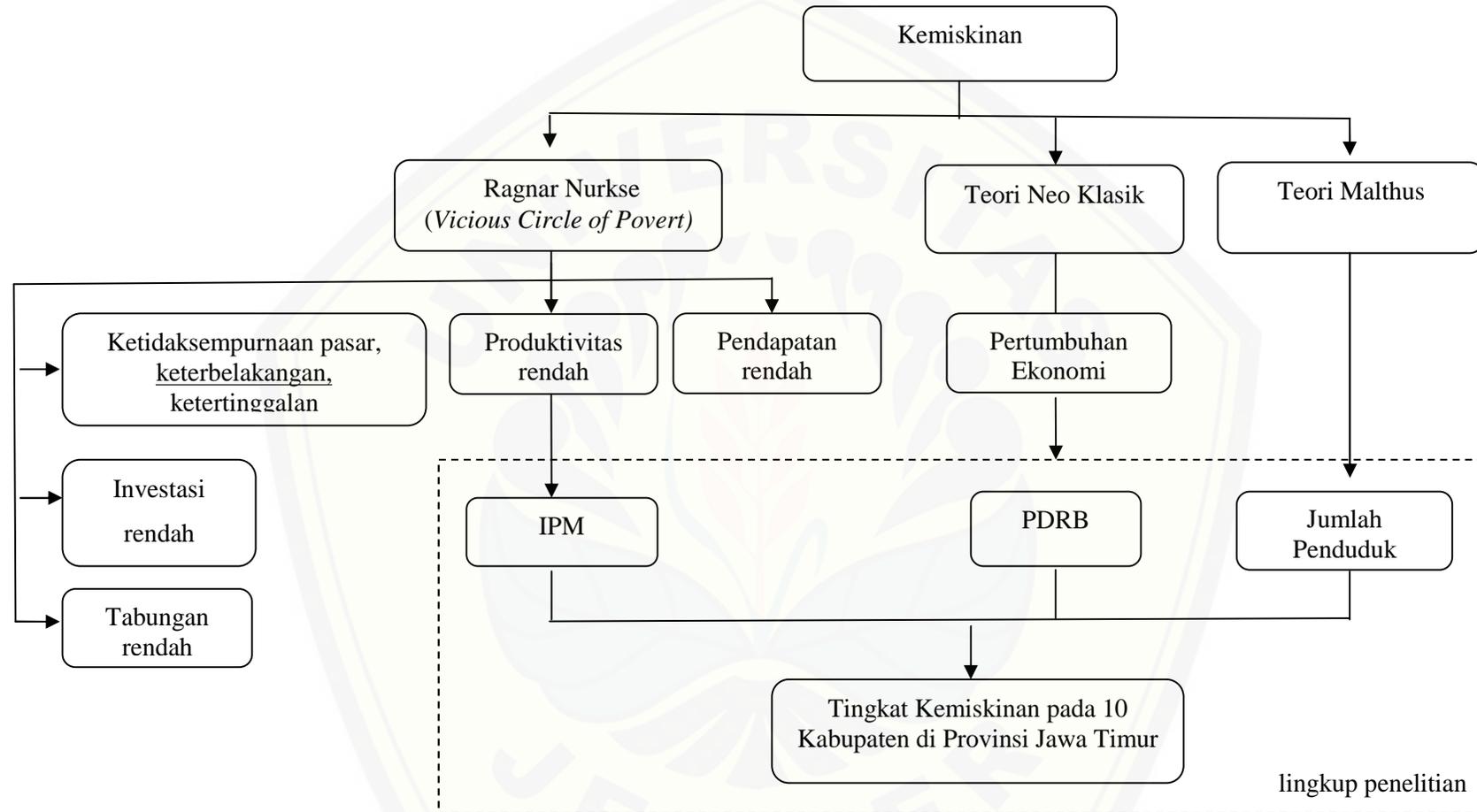
4	Yanthi dan Marheni, 2015. Jurnal. Volume XI no.2 Desember 2015.	Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	Variabel: Pendidikan, Tingkat upah, dan pengangguran. Alat Analisis : Path Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.
5	Nurdiansyah, 2016. Skripsi. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Fakultas ekonomi, Universitas Jember.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Karisidenan Besuki dan Lumajang	Variabel : Pertumbuhan ekonomi, Upah minimum, dan pengangguran. Alat analisis : Explanatory research, analisis panel data	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, sementara variabel upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dan variabel pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Karisidenan Besuki dan Lumajang.
6	Mahsunah, 2013. Jurnal. S1 Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Unesa.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Variabel : Jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran. Alat analisis : Regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.
7	Salam, 2015. Skripsi. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Fakultas ekonomi, Universitas Jember.	Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran Terhadap Angka Kemiskinan di Madura	Variabel ; APBD, PDRB, dan Pengangguran. Alat Analisis : Regresi berganda, panel data	Hasil penelitian menunjukkan variabel APBD (prob 0,0331), PDRB (prob 0,0680), dan variabel angka pengangguran (prob 0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Sumber : Berbagai jurnal, diolah peneliti

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu penjelasan alur penelitian untuk tujuan penelitian hingga penyelesaian berdasarkan kajian teori dan empiris. Setiap negara maupun daerah tentunya berupaya dalam melakukan pembangunan ekonomi agar masyarakat secara keseluruhan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya dipengaruhi oleh kemiskinan yang menjadi masalah yang belum dapat teratasi secara keseluruhan.

Kemiskinan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut teori Ragnar Nurkse kemiskinan merupakan rangkaian yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Salah satu rangkaian dari teori tersebut yaitu adanya produktivitas rendah dan pendapatan rendah, dimana produktivitas rendah dapat mempengaruhi kualitas IPM di suatu daerah. Jika produktivitas rendah maka akan menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Jumlah Penduduk juga mempengaruhi kemiskinan, dimana pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan sumber daya akan habis. Selain itu kemiskinan juga dipengaruhi oleh PDRB, Simon Kuznet menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya dan adanya kemajuan teknologi. Dengan demikian dapat digambarkan kerangka konseptual untuk mempermudah menjelaskan alur dan tujuan penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

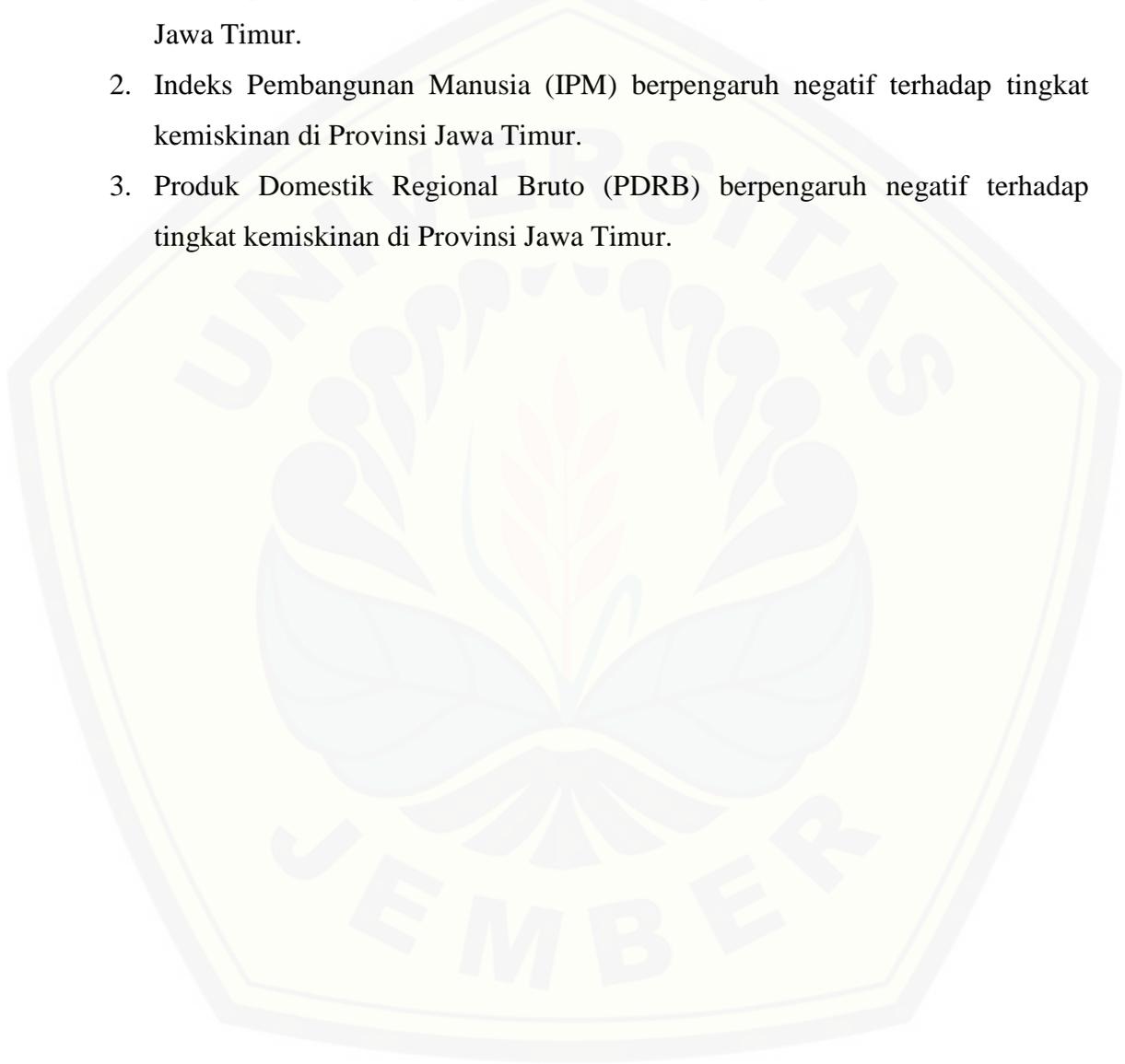


Gambar 2.2 Kerangka konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara yang diajukan berdasarkan perumusan masalah, teori dan penelitian terdahulu, maka disusunlah hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti yang dikemukakan Stokes (2006:21) penelitian kuantitatif merupakan metode yang didasarkan pada informasi numeric atau kuantitas dan dapat diasosiasikan dengan analisis statistika. Jenis *explanatory research*, Herjanto (2007:96) menyatakan bahwa penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang diasumsikan adanya hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang dipengaruhinya. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk, IPM, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2010-2015 dan *cross section* sebanyak 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan penelitian terdahulu.

3.1.3 Waktu dan Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini karena pada 10 Kabupaten tersebut memiliki persentase penduduk miskin tertinggi atau tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Kurun waktu periode penelitian tahun 2010 - 2015.

3.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, maka digunakan model regresi data panel serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi eviews 9.

Ekananda (2016:35), menyatakan di dalam teori ekonometri, proses penyatuan data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*) disebut dengan *pooling*. Sedangkan data yang dihasilkan disebut dengan *pooled data* atau *panel data* atau *longitudinal data*. Dimana analisis tersebut data berupa data tahun 2010-2015 dan data antar individu berupa data 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Ekananda (2016:2), terdapat keunggulan menggunakan data panel secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik-individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya maka penggunaan data panel akan mengurangi masalah *omitted-variables* secara substansial.
4. Karena mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, maka data panel sangat baik digunakan untuk *study of dynamic adjustment* seperti mobilitas kerja.
5. Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang dan meningkatkan derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
6. Pengembangan lebih lanjut analisis data panel ditujukan pada model sebelumnya ditujukan pada data waktu untuk satu individu untuk menjadi analisis beberapa individu.

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*.

Sedangkan model data panel dengan persamaan model data *time-series* adalah :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*.

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} \\ t = 1, 2, \dots, T ; \text{ dan } i = 1, 2, \dots, N$$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel-variabel diatas, sebagai berikut:

$$\text{Tikem} = f(\text{JP}, \text{IPM}, \text{PDRB})$$

Fungsi diatas kemudian dapat ditransformasikan ke dalam model ekonometri sehingga ditulis :

$$\text{Tikem} = \alpha + \beta_1 \text{JP}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana :

Tikem = Tingkat Kemiskinan (%)

JP = Jumlah Penduduk (jiwa)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Milyar)

α = Intersep

β = Koefisien variabel

ϵ = *Error term*

i = 1, 2, ..., N (banyaknya sampel/observasi)

t = 1, 2, ..., T (banyaknya waktu)

Berkaitan dengan penggunaan *panel data* dalam penelitian ini, maka digunakan tiga teknik analisis, yaitu (Ekananda, 2015;405) :

3.2.1 Metode *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect*

Model *pooled* juga sering disebut sebagai model *common* atau *homogeneity*. PLS adalah struktur model estimasi paling sederhana yang mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Di mana estimator akan menghasilkan *intersep* dan *slope* sama untuk setiap individu ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$ dan $\beta_{k1} = \beta_{k2} = \beta_{k3} = \dots = \beta_{ki}$). Dimana k adalah jenis variabel dan i adalah observasi ke- i . Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Tikem}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{JP}_{i,t} + \beta_2 \text{IPM}_{i,t} + \beta_3 \text{PDRB}_{i,t} + e_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan tidak adanya perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan (Tikem) di Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi.

3.2.2 Metode *Fix Effect Model* (FEM)

FEM merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) dari variabel independen menurut individu. Keberagaman individu diketahui melalui *intersep* yang berbeda untuk setiap individu. Dampak dari setiap variabel independen dipertahankan sama untuk setiap individu sepanjang waktu observasi ($\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_i$ dan $\beta_{k1} = \beta_{k2} = \beta_{k3} = \dots = \beta_{ki}$). Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Tikem}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{JP}_{i,t} + \beta_2 \text{IPM}_{i,t} + \beta_3 \text{PDRB}_{i,t} + e_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan (Tikem) di Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi. Penggunaan kata *fixed* pada model FEM menunjukkan bahwa faktor penyebab heterogenitas setiap individu di asumsikan tetap sepanjang waktu observasi. Pengaruh yang tetap dapat dilihat dari penggunaan nilai yang sama (yaitu 1) sepanjang waktu. Nilai 1 ditempatkan pada individu tertentu dan nol untuk individu lainnya. Konsep ini disebut sebagai variabel *dummy*. Secara umum struktur model dalam bentuk *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) adalah:

$$\text{Tikem}_{i,t} = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \beta_1 \text{JP}_{1i} + \beta_2 \text{IPM}_{2i} + \beta_3 \text{PDRB}_{3i} + e_{it}$$

3.2.3 Metode *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan *random effect* mempertimbangkan setiap persamaan karakteristik individu. Penentuan α_i dan β_i didasarkan pada asumsi bahwa *intersep* terdistribusi *random* antar unit μ_i . dengan kata lain, *slope* memiliki nilai yang

tetap tetapi, *intercept* bervariasi untuk setiap individu. Sehingga persamaan untuk model ini adalah:

$$Tikem_{it} = \alpha_i + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \mu_{it}$$

Dari model ini dapat dilihat bahwa *slope* memiliki nilai tetap, tetapi *intersep* α_i memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh *random* μ_i terhadap *intersep* α_i ($\alpha_i = \alpha + \mu_i$) yang bernilai tetap. Dengan model ini diasumsikan bahwa pengaruh dari setiap individu sama.

3.3 Pemilihan Model Data Panel

3.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model terbaik pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan *Pooled Least Square Model* (PLS) dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : menggunakan *Pooled Least Square model* (PLS)

H_A : menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan cara pertimbangan uji F:

1. Jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$) maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS).
2. Jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan metode mana yang paling tepat antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Ekananda, 2015:405) :

H_0 : menggunakan *Random Effect Model* (REM)

H_A : menggunakan *Fix Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi Square* sebagaimana berikut:

1. $\chi_{\text{statistik}} < \chi_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $\chi_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara efek

individu dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Random Effect* (REM).

2. Jika $\chi_{\text{statistik}} > \chi_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $\chi_{\text{statistik}}$ nilai probabilitas kritis maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif H_A . Artinya, efek individual berkorelasi dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Fixed Effect* (FEM).

3.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila dalam uji Hausman hasil model yang terbaik adalah *Random Effect*, maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hal ini untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS atau sebaliknya. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : menggunakan *Pooled Least Square* (PLS)

H_A : menggunakan *Random Effect Model* (REM)

Dasar penolakan H_0 maka digunakan dengan pertimbangan uji statistik *Chi-Square* :

1. Jika $LM_{\text{statistik}} < \chi_{\text{statistik}}$ atau nilai probabilitas $LM_{\text{statistik}} < \text{nilai probabilitas kritis}$ ($= 5\%$), maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan metode yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika $LM_{\text{statistik}} > \chi_{\text{statistik}}$ atau nilai probabilitas $LM_{\text{statistik}} > \text{nilai probabilitas kritis}$ ($= 5\%$), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan metode yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS).

3.4 Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit)

Pengujian kelayakan model (Test of Goodness Fit) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan suatu model yang dibuat dapat menerjemahkan data yang tersedia. Pengukuran yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah:

3.4.1 Uji F (Uji signifikansi simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F dengan cara membandingkan antara nilai F_{tabel} dengan nilai F_{hitung} . Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel independen. Berikut ini penyusunan formula yang digunakan untuk penghitungan uji F secara simultan (Algifari, 2011:72).

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) (n-k)}$$

dimana :

F = Pengujian secara bersama-sama (simultan)

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Banyaknya observasi

n-k = Derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. H_0 : secara bersama-sama variabel independen Jumlah Penduduk, IPM dan PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan.
2. H_A : artinya secara bersama-sama variabel independen Jumlah Penduduk, IPM dan PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan.

Kriteria pengujian berdasarkan perbandingan antara nilai $F_{\text{statistik}}$ dengan nilai F_{tabel} sesuai dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, sebagai berikut :

1. Dengan tingkat keyakinan () 5%, jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F >$ nilai kritis , maka H_0 diterima. Artinya secara bersama variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB tidak mempengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan.
2. Dengan tingkat keyakinan () 5%, jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}}$ nilai kritis , maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya secara

bersama variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB mempengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan.

3.4.2 Uji t-statistik (uji pengaruh secara parsial)

Uji t-statistik pada fungsi regresi $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ bertujuan untuk membuat kesimpulan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini penyusunan formula yang digunakan untuk penghitungan uji t secara parsial.

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

dimana:

t = Pengujian secara parsial

i = Koefisien regresi

Se(i) = *Standard error* dari koefisien korelasi

Perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. H_0 : secara parsial variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan.
2. H_A : secara parsial variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan () 5%, jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t >$ nilai kritis , maka H_0 diterima. Artinya bahwa semua variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB tidak mempengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan.
2. Dengan tingkat keyakinan () 5%, jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ nilai kritis , maka H_A diterima. Artinya bahwa semua variabel independen jumlah penduduk, IPM dan PDRB berpengaruh terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R-Square).

Koefisien regresi ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (uji parsial). Besarnya presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Besarnya koefisien koefisien determinasi adalah 0 sampai 1 dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Semakin mendekati nol, besarnya koefisien determinasi (R^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).
2. Semakin mendekati satu, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (dengan kata lain semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

Pengaruh semua variabel independen (secara simultan) di dalam model regresi terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dengan analisis varians. Alat statistic yang dapat digunakan adalah *Analysis of Variance* (ANOVA) (Algifari, 2011:45).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Ada empat jenis uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Pedoman J-B test adalah :

1. bila nilai $JB_{\text{statistik}} > \text{nilai } X^2_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $J-B_{\text{statistik}}$ nilai probabilitas ($=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
2. bila nilai $JB_{\text{statistik}}$ nilai X^2_{tabel} atau nilai probabilitas $J-B_{\text{statistik}} > \text{nilai probabilitas}$ ($=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah terdistribusi normal.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar data dalam satu variabel, tetapi juga hubungan antara sesama variabel independen. Jika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang erat, maka model regresi ini tergejala oleh kondisi multikolinieritas. Jika tergejala multikolinieritas, maka model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling mengganggu (Gani dan Amalia, 2015:125).

Apabila nilai matrik korelasi melebihi 80% (0,8) maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 2015;409). Ada beberapa dampak terjadinya multikolinieritas, sebagai berikut :

1. estimator masih bersifat *Blue* karena nilai varian dan kovarian besar;
2. nilai hitung t-statistik variabel independen ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat kesalahan pengujian hipotesis;
3. nilai koefisien determinasi R^2 cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel independen yang tidak signifikan.

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya gejala multikolinieritas, maka digunakan cara *regresi auxiliary*. *Regresi auxiliary* digunakan dengan menghitung R^2 dari setiap regresi X_i pada variabel regresor (R^2_i). Identifikasi multikolinieritas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai pada R^2 pada model semua dengan model *auxiliary*. Jika R^2 model *auxiliary* lebih besar dari model semua (R^2 model semua lebih rendah dibandingkan dengan R^2 pada

auxiliary regressions) maka kita mendeteksi adanya multikolinearitas (Ekananda, 2015: 99).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun kecil, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bias dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh varians yang tidak minimum atau tidak efisien (Algifari, 2011:85).

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi ranking *Spearman*. Korelasi ranking *Spearman* dapat dihitung dengan formula:

$$r_s = 1 - 6 \left(\frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right)$$

dimana :

d_i = Selisih ranking standar deviasi (S) dan ranking nilai mutlak *error* ()

N = Banyaknya sampel

Selain melakukan uji korelasi ranking *Spearman*, diagnosis terhadap kemungkinan adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan melakukan uji *Glesjer (Glesjer test)*. Uji ini dilakukan dengan cara membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Algifari, 2011:86). Perumusan hipotesis dari uji *Glejsjer* adalah :

1. H_0 : Varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
2. H_A : Varian dari nilai sisa bernilai sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain terjadi masalah heterokedastisitas.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

1. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ > nilai probabilitas kritis ($=5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa dalam model penelitian terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas kritis ($=5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif H_A . Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa dalam model penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang saling terkait (Gujarati, 2015:354). Akibat dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya atau model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu, untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin-Watson (Algifari, 2011:88).

Tabel 3.5 Kriteria Pengujian Durbin Watson

Kriteria	Hasil
$0 < dw < d1$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif
$d1 < dw < du$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4-d1 < dw < 4$	Gagal menolak H_0 ; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4-du < dw < 4-d1$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$du < dw < 4-du$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif

Sumber: Widarjono (2013,141)

Apabila dalam pemilihan teknik analisis *panel data* ditentukan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah yang terbaik, maka masalah autokorelasi dapat diabaikan karena tidak dibutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi (Nachrowi dan Usman dalam Ekananda, 2016:166).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat terhindar kesalahpahaman

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk (JP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di setiap wilayah analisis Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015. Hal ini berarti bahwa Jumlah Penduduk meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di setiap wilayah analisis Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di setiap wilayah analisis Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2015.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan solusi untuk mengatasi jumlah penduduk agar pertumbuhannya dapat terkontrol, agar tidak menjadi penghambat dalam pembangunan namun sebagai pendorong pembangunan. Penduduk sebaiknya digunakan untuk potensi yang baik dalam proses pembangunan, dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.
2. Melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, diharapkan pemerintah pada setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur lebih meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan publik yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

3. Diharapkan pemerintah lebih fokus memperhatikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada penyebaran pendapatan bagi setiap kalangan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Algifari. 2011. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Bangkalan. *Bangkalan Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
- Badan Pusat Statistik Bojonegoro. *Bojonegoro Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Lamongan. *Lamongan Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Ngawi. *Ngawi Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.
- Badan Pusat Statistik Pacitan. *Pacitan Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan.
- Badan Pusat Statistik Pamekasan. *Pamekasan Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan.
- Badan Pusat Statistik Probolinggo. *Probolinggo Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Sampang. *Sampang Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
- Badan Pusat Statistik Sumenep. *Sumenep Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
- Badan Pusat Statistik Tuban. *Tuban Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Jawa Timur dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Penanggulangan Kemiskinan*. http://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/bab-16-20090202213335_1758_16.pdf. [14 Mei 2017].
- Cholili, Fakhul Mufid. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ellah, Nur. 2016. *Analisis Pengaruh Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Gani, Irwan dan Siti Amalia. 2015. *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Gujarati, Damodar. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 1. Jakarta : Salemba empat.
- Gujarati, Damodar.. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 2. Jakarta : Salemba empat.
- Herjanto, Eddy. 2007. *Manajemen Operasi edisi ketiga*. Jakarta : Grasindo.
- Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Irawan dan Suparmoko. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP.YKPPN
- Mahsunah, Durrotul. 2013. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Mardimin, Johanes. 1996. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan*. Progam Pasca Sarjana.
- Nasir Muh M, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Jurnal eksekutif. Vol 5. No.4, agustus 2008. Lipi : Jakarta.
- Nurdiansyah, Sudrajat. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di karisidenan Besuki dan Lumajang tahun 2008-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Purnamasari, Oktina. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2010-2014*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rupelu, Djunaidi. 2005. *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Melalui Aksesibilitas Publik Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku*. Skripsi. Program pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.
- Salam, Abd. 2015. *Pengaruh APBD, PDRB dan Angka Pengangguran terhadap Angka Kemiskinan di Madura*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Saputra, Wishnu Adi. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Simatupang, Pantjar dan Saktyanu. 2003. *Produk Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*. Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia, hal 191-324, vol. 51, no.3.
- Skuosen, Mark. 2009. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro*. Jakarta : Prenada.
- Stokes, Jane. 2006. *Panduan untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya*. Yogyakarta : Bentang Pustaka.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2001. *Ekonometrika Buku*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian : Penjelasan tentang konsep, istilah, teori, dan indikator serta variabel*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Tambunan, Tulus H. 2003. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono. Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian dan Marheni. 2015. *Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. Jurnal. Volume XI no.2 Desember 2015.

LAMPIRAN A

Data Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM dan PDRB di 10 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2015.

Kabupaten Sampang

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	32.47	880696	54.49	10,064.00
2011	30.21	892301	55.17	10,315.30
2012	27.97	903613	55.78	10,910.90
2013	27.08	913499	56.45	11,623.80
2014	25.80	925911	56.98	11,632.90
2015	25.69	936801	58.18	11,874.50

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Bangkalan

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	28.12	909398	57.23	15,881.40
2011	26.22	918813	58.63	16,406.50
2012	24.70	928024	59.65	16,173.70
2013	23.23	937497	60.19	16,204.00
2014	22.38	945821	60.71	17,369.80
2015	22.57	954305	61.49	16,907.10

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Probolinggo

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	25.22	1099011	59.83	15,028.10
2011	23.48	1107923	60.30	15,912.50
2012	22.22	1116390	61.33	16,936.80
2013	21.21	1123204	62.61	17,808.90
2014	20.44	1132690	63.04	18,681.30
2015	20.82	1140480	63.83	19,570.40

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Sumenep

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	24.61	1044588	57.27	15,136.50
2011	23.10	1050678	58.70	16,064.80
2012	21.96	1056415	60.08	17,665.00
2013	21.22	1061211	60.84	20,218.10
2014	20.49	1067202	61.43	21,476.80
2015	20.20	1072113	62.38	21,750.50

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Pamekasan

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	22.47	798605	59.37	6,994.20
2011	20.94	808114	60.42	7,429.40
2012	19.61	817690	61.21	7,894.00
2013	18.53	827407	62.27	8,375.20
2014	17.74	836224	62.66	8,846.20
2015	17.41	845314	63.10	9,317.20

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Tuban

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	20.19	1120910	61.33	28,017.90
2011	18.78	1127884	62.47	29,934.30
2012	17.84	1134584	63.36	31,816.30
2013	17.23	1141497	64.14	33,678.80
2014	16.64	1147097	64.58	35,519.40
2015	17.08	1152915	65.52	37,254.70

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Pacitan

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	19.50	541799	61.14	6,817.40
2011	18.13	543904	62.03	7,246.20
2012	17.29	545905	62.94	7,705.00
2013	16.73	547917	63.38	8,157.60
2014	16.18	549481	63.81	8,582.20
2015	16.68	550986	64.92	9,019.50

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	18.78	1212301	62.19	33,291.90
2011	17.47	1217775	63.22	36,751.00
2012	16.66	1223079	64.20	38,136.10
2013	16.02	1227704	64.85	39,039.40
2014	15.48	1232386	65.27	39,934.40
2015	15.71	1236607	66.17	46,892.80

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Ngawi

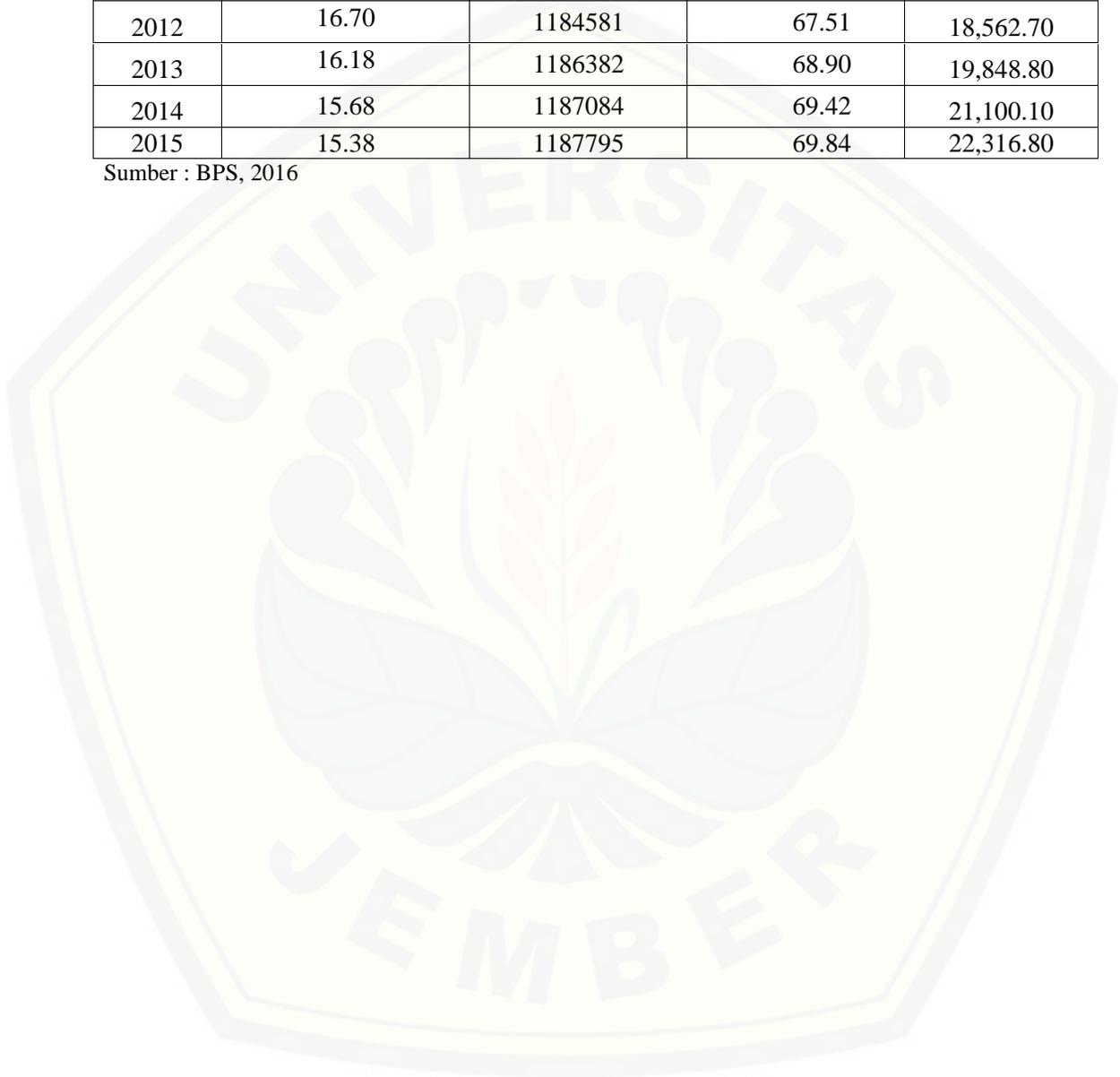
Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	18.26	818989	64.52	8,456.70
2011	16.74	820880	65.84	8,973.30
2012	15.99	822605	66.72	9,568.20
2013	15.45	824587	67.25	10,094.00
2014	14.88	827829	67.78	10,681.00
2015	15.61	828783	68.32	11,224.00

Sumber : BPS, 2016

Kabupaten Lamongan

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	IPM (%)	PDRB (Milyar)
2010	18.70	1180699	65.40	16,275.20
2011	17.41	1182808	66.21	17,360.50
2012	16.70	1184581	67.51	18,562.70
2013	16.18	1186382	68.90	19,848.80
2014	15.68	1187084	69.42	21,100.10
2015	15.38	1187795	69.84	22,316.80

Sumber : BPS, 2016



LAMPIRAN B

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM, dan PDRB

	TIKEM	JP	IPM	PDRB
Mean	20.12467	975994.9	62.48083	18045.43
Median	18.78000	999446.5	62.54000	16188.85
Maximum	32.47000	1236607.	69.84000	46892.80
Minimum	14.88000	541799.0	54.49000	6817.400
Std. Dev.	4.151174	201218.8	3.586163	10179.61
Skewness	0.926820	-0.684556	-0.098909	1.065543
Kurtosis	3.185326	2.657937	2.607746	3.180422
Jarque-Bera	8.675819	4.978687	0.482487	11.43519
Probability	0.013064	0.082964	0.785650	0.003288
Sum	1207.480	58559691	3748.850	1082726.
Sum Sq. Dev.	1016.703	2.39E+12	758.7733	6.11E+09
Observations	60	60	60	60

LAMPIRAN C

Hasil Estimasi *Panel Data Model Pooled Least Square (PLS)*

Dependent Variable: TIKEM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/14/17 Time: 16:44

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.59844	3.215499	24.75461	0.0000
JP	8.10E-06	1.35E-06	6.004887	0.0000
IPM	-1.036455	0.049876	-20.78076	0.0000
PDRB	-0.000145	2.72E-05	-5.329654	0.0000
R-squared	0.904326	Mean dependent var		20.12467
Adjusted R-squared	0.899201	S.D. dependent var		4.151174
S.E. of regression	1.317953	Akaike info criterion		3.454377
Sum squared resid	97.27196	Schwarz criterion		3.594000
Log likelihood	-99.63130	Hannan-Quinn criter.		3.508991
F-statistic	176.4404	Durbin-Watson stat		0.348550
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

=====
LS TIKEM C JP IPM PDRB

Estimation Equation:

=====
TIKEM = C(1) + C(2)*JP + C(3)*IPM + C(4)*PDRB

Substituted Coefficients:

=====
TIKEM = 79.5984428644 + 8.0957334891e-06*JP - 1.03645461906*IPM -
0.000145001897747*PDRB

LAMPIRAN D

Hasil Estimasi *Panel Data Model Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: TIKEM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/13/17 Time: 23:04

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	129.4447	6.849559	18.89825	0.0000
JP	-6.97E-05	1.11E-05	-6.307659	0.0000
IPM	-0.700986	0.122532	-5.720820	0.0000
PDRB	0.000140	5.62E-05	2.495022	0.0162

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987676	Mean dependent var	20.12467
Adjusted R-squared	0.984530	S.D. dependent var	4.151174
S.E. of regression	0.516319	Akaike info criterion	1.704951
Sum squared resid	12.52949	Schwarz criterion	2.158725
Log likelihood	-38.14852	Hannan-Quinn criter.	1.882447
F-statistic	313.9005	Durbin-Watson stat	1.624996
Prob(F-statistic)	0.000000		

Estimation Command:

LS(CX=F) TIKEM C JP IPM PDRB

Estimation Equation:

TIKEM = C(1) + C(2)*JP + C(3)*IPM + C(4)*PDRB + [CX=F,ESTSMPL="2010 2015"]

Substituted Coefficients:

TIKEM = 129.444672625 - 6.97250845944e-05*JP - 0.700985936633*IPM + 0.000140174134414*PDRB + [CX=F,ESTSMPL="2010 2015"]

LAMPIRAN E

Hasil Estimasi *Panel Data Model Random Effect Model*(REM)

Dependent Variable: TIKEM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/14/17 Time: 16:53
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	90.76514	4.101699	22.12867	0.0000
JP	-3.04E-06	2.43E-06	-1.248478	0.2171
IPM	-1.108521	0.058647	-18.90151	0.0000
PDRB	8.79E-05	4.01E-05	2.190637	0.0327

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.238653	0.8520
Idiosyncratic random	0.516319	0.1480

Weighted Statistics

R-squared	0.831792	Mean dependent var	3.376152
Adjusted R-squared	0.822780	S.D. dependent var	1.721477
S.E. of regression	0.724698	Sum squared resid	29.41049
F-statistic	92.30675	Durbin-Watson stat	0.898971
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.766876	Mean dependent var	20.12467
Sum squared resid	237.0181	Durbin-Watson stat	0.111549

Estimation Command:

=====

LS(CX=R) TIKEM C JP IPM PDRB

Estimation Equation:

=====

TIKEM = C(1) + C(2)*JP + C(3)*IPM + C(4)*PDRB + [CX=R]

Substituted Coefficients:

=====

TIKEM = 90.7651364488 - 3.03865425983e-06*JP - 1.1085207509*IPM +
8.79192746921e-05*PDRB + [CX=R]

LAMPIRAN F

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED2

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	35.320204	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	122.965558	9	0.0000

LAMPIRAN G

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: FIXED2

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.323185	3	0.0000

LAMPIRAN H

Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 09/13/17 Time: 22:50

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

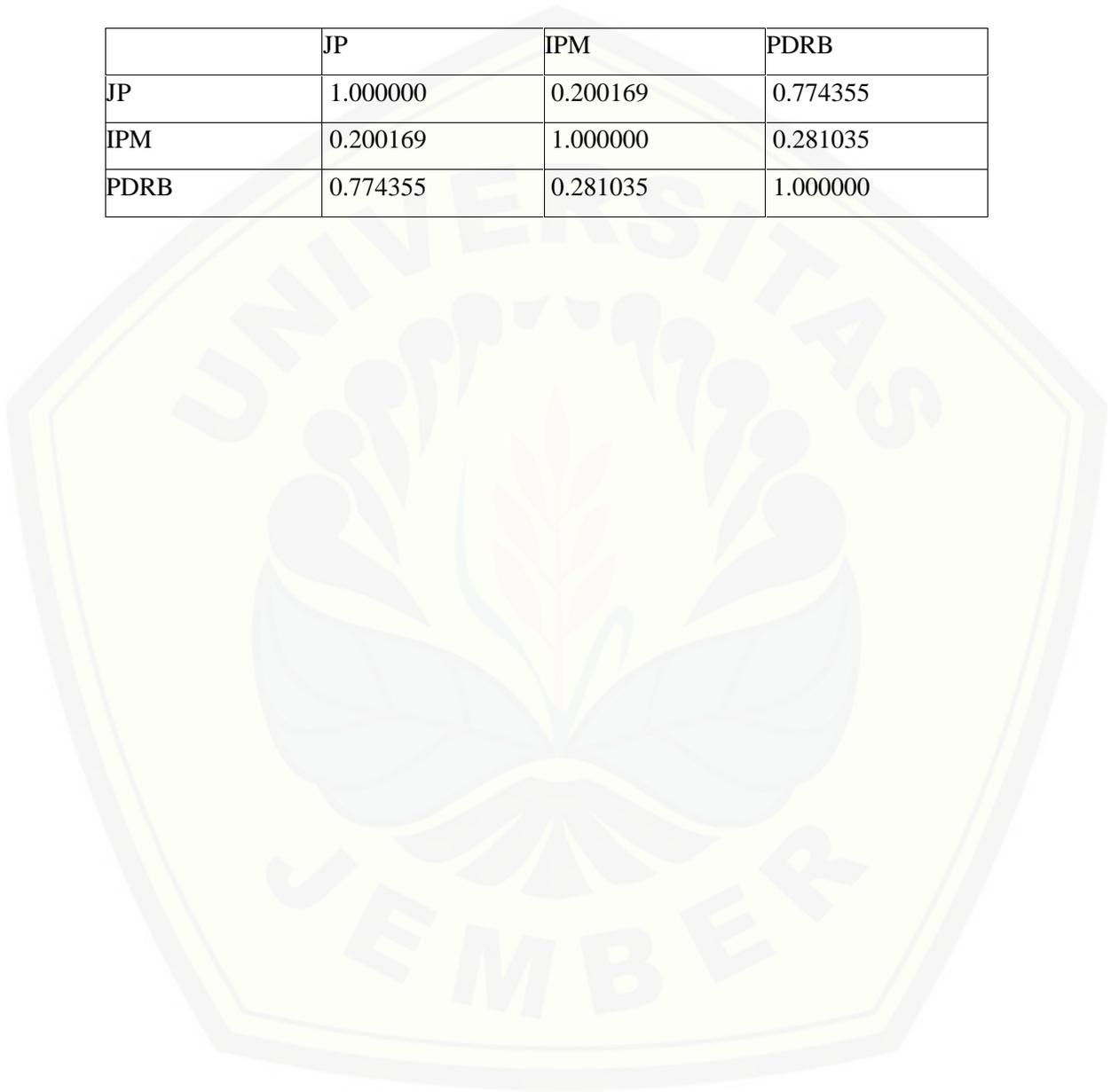
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.463042	0.651538	2.245518	0.0287
JP	-1.01E-07	2.73E-07	-0.368192	0.7141
IPM	-0.015353	0.010106	-1.519210	0.1343
PDRB	-2.86E-06	5.51E-06	-0.518384	0.6062
R-squared	0.088174	Mean dependent var		0.354027
Adjusted R-squared	0.039326	S.D. dependent var		0.272460
S.E. of regression	0.267049	Akaike info criterion		0.261574
Sum squared resid	3.993659	Schwarz criterion		0.401197
Log likelihood	-3.847210	Hannan-Quinn criter.		0.316188
F-statistic	1.805066	Durbin-Watson stat		1.519977
Prob(F-statistic)	0.156743			

LAMPIRAN I

Uji Multikolinearitas

	JP	IPM	PDRB
JP	1.000000	0.200169	0.774355
IPM	0.200169	1.000000	0.281035
PDRB	0.774355	0.281035	1.000000



LAMPIRAN J

Uji Normalitas

